

**PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH
TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI
SUMATERA SELATAN**

SKRIPSI



**Nama : Lia Lestari
NIM : 222015013**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2019**

**PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH
TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI
SUMATERA SELATAN**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



**Nama : Lia Lestari
NIM : 222015013**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2019**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lia Lestari

NIM : 222015013

Jurusan : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka, saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai peraturanyang berlaku.

Palembang, 2019

Penulis



LIA LESTARI

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Di Provinsi Sumatera Selatan
Nama : Lia Lestari
NIM : 222015013
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis
Program studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik

Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal. 2019

Pembimbing I,



Drs. Sunardi, S.E., M.Si
NIDN/NBM : 0206046303/784021

Pembimbing II,



Darna Yanti, S.P., AK., M.M.CA
NIDN/NBM : 0219057901/1187172

Mengetahui
Dekan

J. H. Ketua Program Studi Akuntansi



Betri Sirajudin, S.E., M.Si., AK., CA
NIDN/NBM : 0216106902/944806

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

- ❖ Selalu jadi diri sendiri tidak peduli apa yang mereka katakan dan jangan pernah menjadi orang lain meskipun mereka tampak lebih baik dari anda.
- ❖ Kami datang untuk belajar, kami pulang membawa ilmu.

(LIA LESTARI)

Terucap Syukur Kepada Allah SWT.

Kupersembahkan Kepada :

- ❖ Kedua orang tuaku Tercinta
- ❖ Kakak dan Adiku Tersayang
- ❖ Saudara-Saudaraku Tersayang
- ❖ Dosen pembimbing skripsiku
- ❖ Almamaterku

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarokatu

Alhamdulillahirobbil'Alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadirant Allah yang memberikan rahmat dan hidayah-Nya yang melimpah, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada sang motivator, junjungan umat islam, Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarganya, para sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ‘‘Pengaruh Karakteristik Pemerintah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan’’.

Adapun penelitian ini terbagi menjadi lima bab berturut-turut, bab pendahuluan, bab kajian pustaka, bab metode penelitian, bab hasil dan pembahasan, dan bab simpulan dan saran. Penulis menyadari penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan penulisan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan, dorongan dan dukungan banyak pihak. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada Allah SWT, kepada kedua orang tuaku tercinta, bapakku Judin dan Mamakku PoniyeM yang telah mendidik, membiayai, mendoakan dan memberikan motivasi. Mbaku Dwi Lsi Indahyani, Lilis Atmawati dan seluruh keluarga besarku dan saudara seperjuangan yang dipertemukan karna Allah. Terimakasih karena selalu mendoakan, inspirasi dan dukungan agar menjadi pribadi yang tidak mudah menyerah sehingga penulis dapat

menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga menyampaikan terimakasih kepada Bapak Drs. Sunardi, S.E, M.Si dan Ibu Darma Yanti,S.E.,M.Si,AK,CA yang telah sabar membimbing dan memberikan pengarahannya serta saran-saran yang tulus dan ikhlas dalam menyelesaikan penelitian menjadi lebih baik lagi. Selain itu disampaikan juga terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang. Selain itu ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E.,M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf dan karyawan.
2. Bapak Drs. H. Fauzi Ridwan, M.M, selaku Dekan Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf dan karyawan.
3. Bapak Betri Sirajuddin, S.E,AK.,M.Si.,CA selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Nina Sabrina, S.E.,M.Si selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Drs. Sunardi, S.E.,M.Si dan Ibu Darma Yanti, S.E.,AK.,M.M.CA selaku pembimbingan Skripsi saya yang telah membantu memberikan saran-saran serta perhatian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Ibu Dr. Sa'adah Siddik, S.E.,AK.,M.Si.,CA selaku Pembimbing Akademik.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah membalas kebaikan kalian, akhirulakal dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh

Palembang , 2019

Penulis

Lia Lestari

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN DEPAN/COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
HALAMAN TANDA PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PRAKATA	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
ABSTRACT	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Masalah.....	10
D. Manfaat Penelitian	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN	

HIPOTESIS	12
A. Landasan Teori.....	12
1. Teori Agensi.....	12
2. Karakteristik Pemerintah.....	14
3. Kinerja Keuangan.....	14
a. Definisi Kinerja Keuangan Daerah	14
b. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	17
c. Pengukuran Kinerja Keuangan	19
d. Tujuan Pengukuran Keuangan	21
e. Manfaat Pengukuran Kinerja	22
f. Indikator Kinerja Keuangan	23
4. Kemakmuran (<i>wealth</i>)	25
5. Tingkat Ketergantungan Pada Pusat	27
6. Status Daerah	30
7. Belanja Modal	32
B. Penelitian Sebelumnya	37
C. Kerangka Pemikiran.....	46
D. Pengembangan Hipotesis	46
1. Pengaruh kemakmuran (<i>wealth</i>), tingkat ketergantungan pada pusat, status daerah, belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah	46
2. Pengaruh kemakmuran (<i>wealth</i>) terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah	48
3. Pengaruh tingkat ketergantungan pada pusat terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.....	50
4. Pengaruh status daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah	50
5. Pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah	51
BAB III METODE PENELITIAN	53

A. Jenis Penelitian.....	54
B. Lokasi Penelitian.....	54
C. Operasional Variabel.....	51
D. Populasi dan Sampel	55
E. Data yang Diperlukan	57
F. Metode Pengumpulan Data.....	57
G. Analisis Data dan Teknik Analisis.....	59
1. Analisis Data	59
2. Teknik Analisis	59
a. Uji Asumsi Klasik.....	60
b. Rancangan Uji Regresi Linear Berganda.....	63
c. Uji Hipotesis.....	64
1) Uji F.....	64
2) Uji T.....	65
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	68
A. Hasil Penelitian	68
1. Sejarah Singkat Provinsi Sumatera Selatan	68
2. Arti Logo Provinsi Sumatera Selatan.....	69
3. Kebudayaan Sumatera Selatan.....	70
4. Visi	71
5. Misi	71
6. Tujuan	72
7. Struktur Pemerintahan Daerah.....	73
8. Gambarana singkat tentang BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.....	77
B. Pembahasan Hasil Penelitian	79
a. Analisis Statistik Deskriptif	79
b. Uji Asumsi Klasik.....	80
c. Uji Regresi Linear Berganda.....	85
d. Uji Hipotesis.....	88

1. Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji F)	88
2. Uji Hipotesis Secara Slimutan (Uji T)	89
C. Pengembangan Hasil Hipotesis.....	91
1. Pengaruh Kemakmuran (<i>wealth</i>) Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	91
2. Pengaruh Tingkat Ketergantungan Pada Pusat Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	93
3. Pengaruh Status Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	94
4. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	95
5. Pengaruh Kemakmuran (<i>wealth</i>), Tingkat Ketergantungan Pada Pusat, Status Daerah, Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	96
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	99
A. Simpulan	99
B. Saran.....	98

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
TABEL II.1 : Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Sebelumnya.....	44
TABEL II.2 : Gambar Kerangka Pemikiran	46
TABEL III.1 : Operasional Variabel.....	54
TABEL III.2 : Daftar Sampel Penelitian.....	59
TABEL IV.1 : Gambar Umum Pemerintahan Kabupaten	74
TABEL IV.2 : Tabel Analisis Statistik Deskriptif	80
TABEL IV.4 : Tabel Uji Autokorelasi.....	82
TABEL IV.6 : Tabel Uji Multikolonieritas	84
TABEL IV.7 : Tabel Uji Regresi Linier Berganda	86
TABEL IV.8 : Tabel Uji Hipotesis Secara F	88
TABEL IV.9 : Tabel Uji Hipotesis Secara T	90

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II.1 Kerangka Pemikiran.....	46
Gambar IV.2 Gambaran Umum Pemerintah Kabupaten	75
Gambar IV.3 Uji Pengujian Normalitas P-P Plot.....	81
Gambar IV.5 Uji Pengujian Heterokrdatisitas	83

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1	Laporan Realisasi APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan	100
2. Lampiran 2	Hasil Pengelolaan Data.....	103
3. Lampiran 3	Tabel Statistik DW, DU, Uji F, Uji T.....	107
4. Lampiran 4	Surat Keterangan Selesai Penelitian dan Pengambilan Data	110
5. Lampiran 5	Jadwal Penelitian	111
6. Lampiran 6	Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi	112
7. Lampiran 7	Sertifikat Membaca dan Hafalan Al-Qur'an	113
8. Lampiran 8	Sertifikat Touefl.....	114
9. Lampiran 9	Biodata Penulis	115

ABSTRAK

Lia Lestari/222015013/2019/Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan/Akuntansi Sektor Publik

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Karakteristik pemerintah daerah yang terdiri dari : kemakmuran, tingkat ketergantungan pada pusat, status daerah, dan belanja modal. Sampel dari penelitian ini adalah 56 pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan dengan menggunakan metode purposive sampling. Data di kumpulkan dengan menggunakan metode dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara bersama kemakmuran, tingkat ketergantungan pada pusat, status daerah dan belanja modal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, sedangkan secara parsial, kemakmuran berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, tingkat ketergantungan pada pusat tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan, status daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, dan belanja modal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

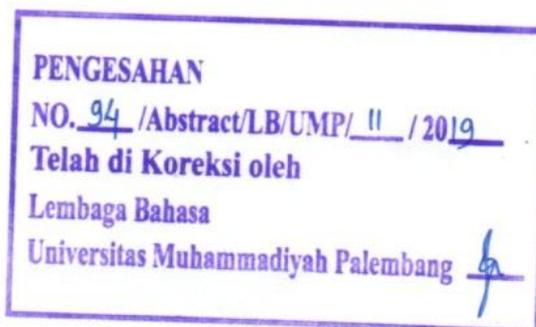
Kata Kunci : kemakmuran, Tingkat Ketergantungan Pada Pusat, Status Daerah, Belanja Modal, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Abstract

Lia Lestari/222015013/2019/The Influence of the characteristics of the local Government's response toward the financial performance of local government district/city in South Sumatra Province /Public Sector Accounting/

This research was aimed at determining the influence of the characteristics of the local Government's response toward the financial performance of local government district/city in South Sumatra Province. Characteristics of local government consisting of: prosperity, the level of dependence on the Centre, the status of the region, and capital expenditures. The sample of this research was 56 County Governments/city in South Sumatra Province by using purposive sampling method. The data collected through the methods of documentation. The results of this research showed that the simultaneous prosperity, the level of dependence on Central, regional and capital expenditure status influence toward the financial performance of local government district/city in South Sumatra Province, while in persial, prosperity did not have an influence toward the financial performance of local government district/city in South Sumatra Province, the level of dependence on the center of the influence toward the financial performance of local government district/town in Sumatera Selatan.

Keywords: wealth, the level of dependence on the Centre, the Status of the region, capital expenditures, financial performance of local government.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Krisis ekonomi yang terjadi pada awal 1996 dan puncaknya padatahun 1997. Penyelenggaraan keuangan daerah dapat mendorong pendelegasian sebagai wewenang pemerintah pusat dalam pelayanan atas dasar keuangan daerah sendiri dan membiayai pembangunan. Pada tahun 1998 terjadi reformasi birokrasi di indonesia yang telah membawa perubahan bagi politik dan sistem pemerintahan maupun administrasi keuangan negara yang diawali dengan perubahan sistem organisasi. Perubahan organisasi teknik prosedur pemerintah mengalihkan dari sentralistik ke desentralistik. Tujuan desentralisasi di indonesia adalah untuk mempromosikan penyampaian informasi yang lebih baik dari layanan pemerintah dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah. Otonomi daerah memberikan pemerintah daerah kewenangan untuk mengelola keuangan daerah masing-masing. Pengelolaan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dapat menyiapkan fasilitas bantuan publik yang lebih baik. menyiapkan infrastruktur merupakan kunci akan pertumbuhan ekonomi.

Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Otonomi daerah diberlakukan dengan diterbitkannya UU No. 22 dan 25 tahun 1999 kemudian direvisi melalui UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Dengan demikian pemerintah daerah diharapkan dapat mengelola sumber daya yang dimilikinya dan melaksanakan tata kelola pemerintah yang baik sehingga akan berdampak pada pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

UU No. 32 Tahun 2014 menerangkan bahwa pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asa otonomi dan bertugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun (1945).

Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonomi. Penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerintah, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah,

serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintah daerah.

Otonomi daerah didasarkan pada asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Otonomi tersebut bersifat luas karena kewenangan berada pada daerah (seperti pada negara federal). Otonomi bersifat nyata karena memerlukan kewenangan untuk menyelenggarakan, tumbuhan, hidup berkembang di daerah. Sedangkan disebut otonomi bersifat tanggungjawab karena pemerintah pusat telah menyerahkan kewenangan kepada daerah demi pencapaian tujuan otonomi daerah. Hal ini untuk meningkatkan pelayanan kesejahteraan masyarakat agar semakin baik, kehidupan yang demokratis, adil, rata, dan hubungan yang serasi dalam Republik Indonesia.

Kebijakan Pemerintah yang tertuang UU No. 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah, dengan kesinambungan kepemimpinan di provinsi, kabupaten/kota diperlukan mekanisme peralihan kepemimpinan daerah di masa jabatannya yang demokratis untuk dapat menjamin pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Ketentuan dan wewenang dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, kabupaten/kota perlu dilakukan penyesuaian dengan undang-undang yang mengatur pemilihan gubernur, bupati dan wali kota. Dengan adanya Otonomi Daerah dan Desentralisasi setiap masyarakat mampu melihat karakteristik dan potensi yang ada di daerah tersebut. Dalam hal ini segi karakteristik dapat dilihat

melalui: kemakmuran pemerintah daerah, status daerah, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, belanja modal daerah.

Provinsi Sumatera Selatan sejak berabad yang lalu dikenal juga dengan sebutan Bumi Sriwijaya. Pada abad ke-7 hingga abad ke-12 Masehi wilayah ini merupakan pusat kerajaan Sriwijaya yang juga terkenal dengan kerajaan maritim terbesar dan terkuat di Nusantara. Gaung dan pengaruhnya bahkan sampai ke madagaskar di Benua Afrika. Sejak abad ke-13 sampai abad ke-14, wilayah ini berada di bawah kekuasaan Majapahit. Selanjutnya wilayah ini pernah menjadi daerah tak bertuan dan bersarangannya bajak laut dari mancanegara terutama dari negeri cina pada awal abad ke-15 berdirilah kesultanan Palembang yang berkuasa sampai datangnya Kolonialisme Barat, lalu disusul oleh Jepang. Ketika masih berjaya, Kerajaan Sriwijaya juga menjadikan Palembang sebagai kota kerajaan.

Menurut Ni Made (2016) Karakteristik pemerintah daerah ialah identitas yang dimiliki oleh setiap pemerintah daerah yang dapat membedakannya dengan daerah lain. Suhadjanto dan Yulianingtyas (2010) karakteristik pemerintah daerah yaitu ciri khusus pada pemerintah daerah yang dapat membedakannya dengan daerah lain.

Kemakmuran (*wealth*) adalah kemampuan untuk mencukupi kebutuhan. kemakmuran daerah (*wealth*) dari pemerintah daerah dapat dilihat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan kekayaan riil dari masing-masing daerah. Pendapatan

Asli Daerah (PAD) sendiri bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.

Ni Made (2016) Status daerah merupakan sebuah pengakuan nasional atas suatu daerah sebagai kabupaten atau kota. pemerintah kota dengan sumber dana yang lebih baik akan mempunyai kemungkinan yang lebih baik pula dalam pelaksanaan pemerintah daerah karena dukungan sumber daya tersebut untuk mencapai sasaran pemerintah daerah, sehingga mampu menciptakan kinerja yang lebih baik.

Widya (2012) tingkat ketergantungan dengan pusat dinyatakan dengan besarnya Dana Alokasi Umum (DAU). Menurut UU Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 menerangkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk menandai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dapat menimbulkan dampak negatif terhadap pengelolaan pemerintah yang dikarenakan belum mempunyai pemerintah daerah untuk membiayai belanja aparaturnya sendiri. Kualitas pelayanan publik yang menggambarkan kinerja pemerintah daerah diharapkan akan meningkat jika adanya peningkatan insfratraktur daerah.

Menurut Halim (2014 : 107) belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang

memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. belanja modal umumnya dialokasikan untuk perolehan aset tetap yang dapat digunakan sebagai sarana pembangunan daerah. Dengan berkembang pesatnya pembangunan diharapkan terjadi peningkatan kemandirian daerah dalam membiayai kegiatannya terutama dalam hal keuangan. Untuk dapat mengetahui terjadinya peningkatan kemandirian daerah, pendapatan asli daerah bisa dijadikan sebagai tolak ukurnya karena PAD sendiri merupakan komponen yang penting yang mencerminkan bagaimana sebuah daerah dapat mendanai sendiri kegiatannya melalui komponen pendapatan murni yang dihasilkan melalui daerah tersebut.

Menurut Mardiasmo (2009: 121) pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efisiensi, dan efektif. Sistem pengukuran kinerja sektor publik bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial.

Menurut Sudaryo (2017 : 8-10) Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi. Apabila pencapaian sesuai dengan yang direncanakan, maka kinerja yang dilakukan terlaksana dengan baik. Apabila pencapaian melebihi dari apa

yang direncanakan dapat dikatakan kinerjanya sangat bagus. Apabila pencapaian tidak sesuai dengan apa yang direncanakan atau kurang dari apa yang direncanakan, maka kinerjanya jelek.

Menurut Yoyo (2017 : 9) Kinerja Keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan melaksanakan analisis rasio terhadap APBD yang ditetapkan dan dilaksanakannya.

Penyelenggaran pemerintah daerah dalam mengelola rumah tangganya kita harus melihat kinerja yang dilakukan oleh pemerintah itu sendiri, seperti yang dicantumkan dalam PP No. 6 tahun 2008 kinerja penyelenggaran pemerintah daerah adalah capaian atas penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang diukur dari masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak.

Penelitian yang dilakukan oleh *Rafrini (2016)* menyatakan bahwa *wealth* memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan oleh *Renas (2014)* menyatakan bahwa status daerah berpengaruh terhadap signifikan terhadap pemerintah kinerja daerah. Penelitian *Rafrini (2016)* menyatakan bahwa tingkat ketergantungan pada pusat memiliki pengaruh signifikan positif terhadap

kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan oleh *Mulia (2016)* menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh *Putu (2016)* menyatakan bahwa kemakmuran tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Penelitian yang dilakukan oleh *Armaja (2015)* menyatakan bahwa tingkat ketergantungan pada pusat tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan oleh *Dul (2014)* yang menyatakan bahwa status daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan oleh *Rizal (2017)* menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Berikut ini Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan (Lampiran I) dapat dilihat pada tabel I.I. Berdasarkan tabel I.I laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013-2016. Kinerja keuangan daerah Provinsi Sumatera Selatan belum cukup baik. Hal ini dilihat dari rasio PAD, tingkat ketergantungan pada pusat dan belanja modal yang masih terjadi naik turun disetiap Kabupaten/Kota. Rasio realisasi PAD tahun 2013-2016 di kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2016 Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan mengalami penurunan, terkecuali Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kota

Lubuk Linggau, dan Kota Prabumulih pada tahun 2016 mengalami kenaikan. Tingkat ketergantungan pada pusat pada tahun 2013-2016 di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan juga mengalami kenaikan dan penurunan, terkecuali Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan Kota Pagar Alam mengalami kenaikan.

Rasio realisasi belanja modal pada tahun 2013-2016 mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2016 Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan mengalami penurunan, terkecuali Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Musi Bayuasin, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Musi Rawas Utara. PAD bantuan pemerintah pusat provinsi pada tahun 2013-2016 mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan mengalami penurunan, terkecuali Kabupaten Lahat, Kabupaten Bayuasin, Kabupaten Ogan Ilir, dan Kota Lubuk Linggau. Di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2013 dan 2015 dapat dilihat dari rasio realisasi PAD, tingkat ketergantungan pada pusat, rasio belanja modal dan PAD bantuan pemerintah di semua Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan dapat dikatakan meningkat.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini seberapa besarkah pengaruh kemakmuran (*wealth*), tingkat ketergantungan pada pusat, status daerah, dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan?

C. Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kemakmuran (*wealth*), tingkat ketergantungan pada pusat, status daerah, dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Peneliti ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pihak-pihak sebagai berikut:

1. Peneliti ini diharapkan menambah wawasan, ilmu pengetahuan, pengalaman serta pemahaman yang lebih baik terutama mengenai karakteristik pemerintah daerah.
2. Bagi Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan pertimbangan mengenai karakteristik pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.

3. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan serta dapat menambah wawasan, ilmu pengetahuan yang menjadi acuan atau kajian bagi penulis dimasa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim (2014) *Akuntansi Keuangan Daerah*(Edisi 4). Jakarta: Salemba Empat.
- Abdullah Syukriy (2004). Perilaku Oportunistik Legislatif Dalam Penganggaran Daerah: Pendekatan Principal-Agent Theory. Diakses 17 Oktober 2018, file: D/DATA UP/Jurnal/0403-0201-Fin.Pdf
- Anwar Sanusi (2016) *Metode Penelitian Bisnis*, Salemba Empat
- Armaja, dkk (2015, September). Pengaruh Kekayaan Daerah, Dana Perimbangan, Dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 3(2). Diakses 15 Oktober 2018, file: D/DATA UP/Jurnal/14424-28856-SM.pdf
- Baldric Silegar (2015) *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Kedua. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Budi Santoso (2015) *Keagenan (agency)*. Bogor. Gralia Indonesia
- Deddi Noerdiawan (2008) *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta :Salemba Empat
- Dul Muid Reanas (2014). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2009-2011. *Diponegoro Journal Of Accountting*. 4(3). Diakses 16 Oktober 2018, file: D/DATA UP/Jurnal/7640-2134.pdf
- Duwi Piyatno (2016) *SPSS Handbook* Cetakan Pertama. Yogyakarta : Mediakom
- Djoko Suhadjanto dan Rena Rukmita Yulianingtyas (2011, November). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*, 8(1). Diakses 22 Oktober 2018, file: D/DATA UP/Jurnal/10285-19870-1-SM.pdf
- Dy Ilham Satria dan Heny Puspita Sari (2018, Januari) .Pengaruh Kemakmuran (Wealth), Intergovernmental Revenue, Leverage Dan Opini Audit Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Lhokseumawe*. 9(1). Diakses 16 Oktober 2018, file: D/DATA UP/Jurnal/2487-2892.pdf

- Hafidh Susila Sudarsana dan Shiddiq Nur Rahardjo (2013). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 2(4). Diakses 16 Oktober 2018, file: D/DATA UP/Jurnal/0403-0201.pdf
- Herningsih Sucahyo (2013). Pengaruh *Opini* Audit Dan Kinerja Keuangan. *Jurnal Buletin Ekonomi*, 11(1). Diakses 25 Oktober 2018, file: D/DATA UP/Jurnal/0403-0201.pdf
- IAI. (2016). *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: IAI.
- Kasmir (2014) *Analisis Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Rajagrafindo Persada.
- Mardiasmo (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : ANDI
- Mulia Andirfa, dkk (2016, Agustus). Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan, dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Magister Akunatnsi*, 5(3). Diakses 19 Oktober 2018, file: D/DATA UP/Jurnal/9612-3671-SM.pdf
- Ni Made Suryaningsih dan Eka Ardhani Sisdyani (2016, Mei). Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Opini Audit Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 15(2). Diakses 16 Oktober 2018, file: D/DATA UP/Jurnal/5672-2865-SM.pdf
- Putu Riesty Masdiantini, dkk (2016, Febuari). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kemakmuran (Wealth), Intergovernmental Revenue, Temuan Dan Opini Audit BPK Pada Kinerja Keuangan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Diakses 18 Oktober 2018, file: D/DATA UP/Jurnal/2743-2532-SM.pdf.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akunatansi Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2008 Tentang pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Istanis Pemerintah.

Rafrini Amyulianthy dkk (2016). Characteristics and Political Connection To Local Government Performance. *Jurnal Riset (Akunatnsi Riset)*, 8(2). Diakses 26 Oktober 2018, file: D/DATA UP/Jurnal/23543-2543.pdf

Ramli Faud (2016) *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Bogor : Ghalia Indonesia

Rizal Qowi dkk (2017). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Pemeriksaan BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di indonesia Tahun Anggaran 2012. *Diponegoro Journal Of Accounting*. 6(1). Diakses 16 Oktober 2018, file: D/DATA UP/Jurnal/1892-3726.pdf

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 *Tentang Otonomi Daerah*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 *Tentang Pemerintah Daerah*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintah daerah*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 *Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara*.

V. Wiratna Sujarweni (2015) *Metode Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Cetakan Pertama. Yogyakarta : Penerbit Pustaka Baru Press.

Widya Astuti Mustikarini, dkk (2012). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit BPK Terhadap Kabupaten/Kota Di Indonesia Tahun Anggaran 2007. *From: Simposium Nasional Akuntansi. XV:Banjarmasin*. Diakses 17 Oktober 2018, file: D/DATA UP/Jurnal/5592-6726.pd

Wulandari Iryanie (2017) *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah*. Cetak Pertama. Yogyakarta : CV BUDI UTAMA

Yoyo Sudaryo dkk (2017) *keuangan di Era Otonomi Daerah*. yogyakarta : Andi

